

Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2017

Effects of Minimum Wages, Inflation and HDI on the Number of Poor Populations in Indonesia in 2000-2017

¹Irham Maulana Risyad, ²Ima Amaliah, ³Westi Riani

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹Irhammaulanarisad17@gmail.com, ²Amalia.razi@gmail.com, ³Westiriani@yahoo.com

Abstract. This research is based on the condition of the number of poor people in Indonesia which tends to decrease, but in quality the condition is getting worse. This can be seen from the poverty rate in Indonesia which amounted to 1.74% in 2016 and increased to 1.83% in 2017. There are many factors that can affect the number of poor people, namely the minimum wage, inflation and IPM. This study aims to determine how much influence and how much influence the minimum wage, inflation and IPM on the number of poor people in Indonesia. The method used is the Ordinary Least Square (OLS) method with a regression model. The data used in this study are secondary data published by BPS 2000-2017 period. The data is processed using the E-views program 9. The results show that minimum wages and IPM have a negative and significant effect on the number of poor people in Indonesia, while inflation has a positive and significant effect on the number of poor people in Indonesia.

Keywords: Poor Population, Minimum Wage, Inflation, IPM.

Abstrak Penelitian ini didasari oleh kondisi jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cenderung menurun, namun secara kualitas kondisinya semakin parah. Ini terlihat dari angka tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia sebesar 1,74% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 1,83% pada tahun 2017. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu upah minimum, inflasi dan IPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan berapa besar pengaruh upah minimum, inflasi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan model regresi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS periode 2000-2017. Data diolah dengan menggunakan program E-views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum, Inflasi, IPM.

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan

dan tingkat pengangguran (Todaro, 2008:18). Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional (Aspiranti dan Ima Amaliah, 2018). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Kaufman, 2000). Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih di bawah

standar, tingkat pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Seseorang dikatakan miskin bila orang yang bersangkutan belum bisa mencukupi kebutuhannya secara layak. Menurut Dwijayanto (2010:33), semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi yang terdiri dari dua elemen yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tabel 1. Perkembangan upah minimum, inflasi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
2013	1,296,908	8,38	73,81	28,31
2014	1,506,231	8,36	68,90	28,00
2015	1,790,342	3,35	69,55	28,55
2016	1,997,819	3,02	70,18	27,88
2017	2,057,528	3,61	70,81	27,17

Sumber : BPS Indonesia dalam angka 2013

Tabel 1 diatas terlihat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 sebanyak 27,12 juta orang sedikit lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 yang berjumlah 28,13 juta orang. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun namun secara kualitas kondisinya semakin parah. Ini teridentifikasi dari tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia sebagaimana terlihat dari data BPS. Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2016 sebesar 1,74% dan

meingkat menjadi 1,83% pada bulan yang sama tahun 2017 (BPS, 2017). Ini artinya secara kuantitas jumlah penduduk miskin menurun namun kondisi seseorang miskin semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Kondisi ini diperparah oleh (inflasi) peningkatan harga-harga kebutuhan di masyarakat. Pada tahun 2016 upah minimum sebesar Rp 1,997,819 juta rupiah per bulan dan tahun 2017 upah minimum meningkat menjadi Rp 2,057,528 juta rupiah. Namun dalam waktu bersamaan ternyata inflasi juga mengalami peningkatan dimana tahun 2016 tingkat inflasi di Indonesia sebesar 3,02% dan tahun 2017 meningkat menjadi 3,61%. Ini artinya peningkatan upah nominal terkikis oleh peningkatan harga-harga kebutuhan di masyarakat yang berefek pada penurunan pendapatan riil masyarakat. Dengan demikian, kenaikan upah tidak menjadikan masyarakat lebih sejahtera tetapi dimungkinkan akan meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah IPM. IPM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tingginya IPM menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin menurun. Pada tahun 2013-2015 terlihat ada hubungan searah antara IPM dengan jumlah penduduk miskin. Artinya semakin rendah IPM penduduk miskin semakin banyak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh upah minimum, inflasi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2000-2017,
2. Besarnya pengaruh upah

minimum, inflasi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2000-2017.

B. Landasan Teori

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2004) kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan;
2. Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan sumberdaya alam dan lingkungan;
3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan;
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Lebih lanjut, BPS melihat kemiskinan dari tingkat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2001). Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia merupakan garis kemiskinan (*poverty line*). BPS menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum merupakan

tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan.

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 15 Tahun 2018 “ Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja, ditetapkan upah minimum yaitu untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989).

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi tiga (Vio Achfuda, 2010:41) yaitu: a. *Demand Pull Inflation*, inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. b. *Cosh Push Inflation*, inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada

Cost Push Inflation tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. c. *Mixed Inflation*, gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi.

Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga kemiskinan akan meningkat.

Selain inflasi faktor lain yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin adalah IPM, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas Pendidikan masyarakat. IPM merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini, IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil

program pembangunan yang telah dilakukan. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga akan menjerumuskan seseorang dalam kemiskinan (Kristanto, Bonivasius Prasetya: 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Statistika

1. Uji t

Tabel 2. Ringkasan Nilai t-statistik Model Pengaruh upah minimum, inflasi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin

No	Variabel	t-statistik	t-tabel	Hasil Uji	Hasil
1	Upah Minimum	-7,341017	2.160	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha=0.05$
2	Inflasi(-1)	2,302353	2.160	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha=0.05$
3	IPM(-1)	-3,269280	2.160	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha=0.05$

Sumber: Hasil data sekunder diolah, E-views-9

Dari Tabel 2. hasil estimasi untuk variabel upah minimum, inflasi dan IPM maka diperoleh t-statistik > t-tabel maka H_0 ditolak yang berarti

variabel upah minimum, inflasi dan IPM secara parsial berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tingkat signifikan 95%.

2. Uji F

Tabel 3. Ringkasan Nilai f-statistik Model pengaruh upah minimum, inflasi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Variabel	f-hitung	f-tabel	Hasil Uji
Upah Minimum, Inflasi, IPM	49.65214	3.41	f-hit > f-tabel

Sumber: Hasil data sekunder diolah, E-views 9

Dari Tabel 3. dengan menggunakan derajat kebebasan pembilang ($k-1=3$) dan derajat kebebasan penyebut ($n-k = 13$), diperoleh hasil ($f\text{-tabel} = 3.41$) pada tingkat signifikan 0.05, untuk $f\text{-hitungnya}$ yaitu 49.65214 dengan membandingkan antara $f\text{-hitung}$ dengan $f\text{-tabel}$ diperoleh $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ sehingga H_0 ditolak. Artinya variabel upah minimum, inflasi dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%.

Uji Ekonometrika

1. Heteroskedastis

Dari Tabel 4. hasil uji heteroskedastis dengan menggunakan uji *white* memiliki kriteria bahwa nilai *Obs*R-squared* lebih besar dari $\alpha = 0.05$ ($0.7625 > 0.05$). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti pada model regresi tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis.

2. Autokorelasi

Dari Tabel 4. hasil perhitungan uji LM diperoleh nilai *Obs*R-squared* sebesar 0.848885 lebih besar dari $\alpha = 0.05$ berarti H_0 diterima. Artinya dalam

Tabel 4. Ringkasan Pengujian Asumsi Klasik

No	Jenis Pengujian	Alat Uji	Hasil
1	Heteroskedastis	Uji <i>White</i> : <i>Obs*R-Squared</i> 0.7625, $\alpha = 0.05$ ($0.7625 > 0.05$)	Tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis
2	Autokorelasi	Uji <i>LM</i> : <i>Obs*R-Squared</i> 0.848885, $\alpha = 0.05$ ($0.848885 > 0.05$)	Tidak terdapat masalah autokorelasi
3	Multikolinier	$R^2 = 0.919731$ R^2 Upah Minimum, Inflasi(-1)*IPM(-1) = 0.276788 R^2 Inflasi(-1) Upah Minimum*IPM(-1) = 0.270422 R^2 IPM(-1) Upah Minimum*Inflasi(-1) = 0.196707	Tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi
4	Linearitas	Uji <i>Ramsey</i> : <i>f-stat</i> 0.9153, $\alpha = 0.05$ ($0.9153 > 0.05$)	Model estimasi bersifat linear
5	Normalitas	<i>Jarque-Bera</i> atau <i>J-B Test</i> : Probabilitas 0.136093, $\alpha = 0.05$ ($0.136093 > 0.05$)	Model estimasi berdistribusi normal

model estimasi tidak terdapat masalah autokorelasi.

3. Multikolinier

Dari Tabel 4. hasil pengujian diperoleh R^2 baru yang lebih kecil dari R^2 lama. Artinya tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi.

4. Linearitas

Dari Tabel 4. hasil pengujian diperoleh $F\text{-statistik}$ yang lebih besar dari tingkat $\alpha = 0.05$ ($0.9153 > 0.05$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% model estimasi bersifat linear.

5. Uji Normalitas

Dari Tabel 4. hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat $\alpha = 0.05$ ($0.136093 > 0.05$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% residual dari model estimasi berdistribusi normal.

Analisis Ekonomi

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 5. Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin

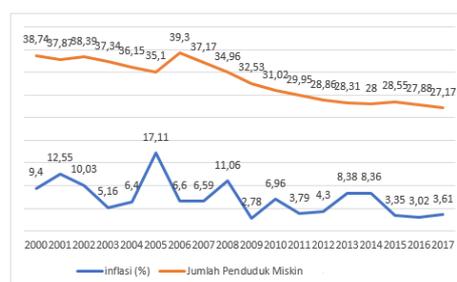
Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
2000	216,500	38,74
2001	290,500	37,87
2002	362,700	38,39
2003	414,700	37,34
2004	458,500	36,15
2005	507,697	35,10
2006	602,702	39,30
2007	637,261	37,17
2008	743,174	34,96
2009	841,529	32,53
2010	908,824	31,02
2011	988,829	29,95
2012	1,088,903	28,86
2013	1,296,908	28,31
2014	1,506,231	28,00
2015	1,790,342	28,55
2016	1,997,819	27,88
2017	2,057,528	27,17

Sumber: BPS Indonesia dalam Angka 2013

Dari Tabel 5. diatas pada tahun 2005 hingga tahun 2006 upah minimum mengalami peningkatan dari Rp 507,697 pada tahun 2005 menjadi Rp 602,702 pada tahun 2006. Pada periode yang sama peningkatan jumlah upah minimum tidak diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 35,10 juta orang menjadi 39,30 juta orang. Meningkatnya upah minimum Rp 100.000 ternyata tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga di dalam perekonomian karena adanya kenaikan harga BBM. Pada bulan Februari 2005 telah terjadi kenaikan inflasi sebesar 17,95%. Artinya kenaikan upah sebesar 18,71% terkikis habis oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sebesar 17,95%. Kenaikan BBM telah memicu naiknya berbagai macam komoditas yang disebabkan BBM akan membebani biaya produksi baik dari ongkos transportasi maupun kenaikan

biaya bahan bakar. Dengan demikian, kenaikan BBM menjadi pemicu meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia, karena semakin banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara layak.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

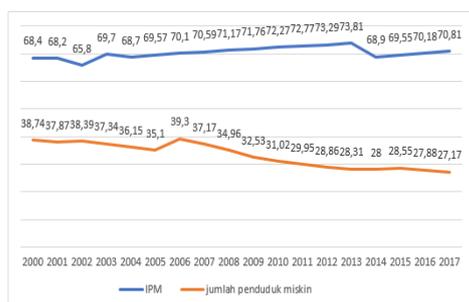


Gambar 1. Grafik Inflasi dan Jumlah Penduduk Miskin

Sumber : Data sekunder diolah

Tahun 2005-2006 pemerintah mengeluarkan kebijakan pencabutan BBM bersubsidi yang berdampak pada peningkatan sejumlah BBM yaitu (premium) dari harga Rp 4,500/liter menjadi Rp 6,500/liter. Peningkatan harga BBM ini telah berdampak pada peningkatan hamper seluruh komoditas kebutuhan pokok masyarakat (inflasi naik sebesar 17,11%). Kondisi ini secara langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 35,10 juta orang menjadi 39,30 juta orang. Upaya pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 memperkenalkan program BLT kepada masyarakat.

3. Pengaruh IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin



Gambar 2. Grafik IPM dan Jumlah Penduduk Miskin

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan Gambar 2. terlihat perkembangan IPM yang terus meningkat, namun pada beberapa tahun tertentu, seperti tahun 2002-2003. IPM mengalami peningkatan dari 65,8 pada tahun 2002 menjadi 69,7 pada tahun 2003. Peningkatan IPM tahun 2002-2003 sebagai efek dari meningkatnya angka harapan hidup dari 76,20 menjadi 78,80 dan angka melek huruf dari 89,50 menjadi 90,93. Sementara daya beli mengalami penurunan dari 58,47 menjadi 56,89. Daya beli masyarakat Indonesia cenderung mengalami penurunan terhadap beberapa kategori produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti makanan, detergen, obat-obatan dan lain sebagainya.

D. Kesimpulan

1. Dari hasil estimasi model jumlah penduduk miskin di Indonesia teridentifikasi semua variabel Independen yaitu upah minimum, inflasi dan IPM secara parsial signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hubungan antar variabel dependen dan independen sesuai dengan hipotesis yang dibangun di awal. Adapun variabel yang paling besar

pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu IPM disusul dengan inflasi dan upah minimum.

2. Besarnya pengaruh variabel upah minimum, inflasi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 91,97%, sementara sisanya dikarenakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- Achfuda Vio, 2010, Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, PDB, Inflasi, dan tingkat Teknologi Terhadap PMDN di Indonesia Periode 1986-2008. Semarang: UNDIP.
- Aspiranti, Tasya, and Ima Amaliah. "Determinants of social poverty in mountainous areas of Talegong, Garut Regency." (2018).
- Badan Pusat Statistik 2013, Indonesia dalam angka 2013. Jakarta ; BPS
- Badan Pusat Statistik 2017, Indonesia dalam angka 2017. Jakarta: BPS
- Bappenas, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2001, Indonesia dalam angka 2000. Jakarta ; BPS
- Kaufman, dan Julie Hotchkiss. 2000. " The Economics Of Labor Market", Fifth Edition. The Dryden Press
- Kristianto, David dan Bonivasius Prasetya. 2017. Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia. Jakarta
- Todaro, Michael P. 2008. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
05/Men/1989

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 15
Tahun 2018